

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Mengacu pada hasil analisa isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam Bab IV Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 tentang Analisis Isu-isu Strategis, khususnya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, maka diperoleh kesimpulan permasalahan dalam pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Pati sebagaimana Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah

Kabupaten Pati

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Isu :	Indikator tujuan :	Indikator Program :
1	Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kemiskinan, dan Kesejahteraan Sosial	Masih rendahnya tingkat pelestarian nilai seni dan budaya	Belum optimalnya sekolah dan instansi pemerintah yg menerapkan kebijakan tentang pelestarian budaya lokal termasuk penyelenggaraan ekstra kurikuler seni budaya di sekolah
	Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan Peningkatan akhlak budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal	Belum optimalnya seni yang dilestarikan	Rendahnya pertumbuhan pelaku seni dan kelompok budaya yang aktif
		Belum optimalnya nilai Budaya yang dilestarikan	Belum optimalnya pelestarian cagar budaya yang ada

2		Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 25 tahun	APK PAUD
		Masih terdapat penduduk buta huruf di Kabupaten Pati	Persentase PAUD yang bisa melaksanakan kurikulum sesuai standar
		Belum terpenuhinya Harapan lama sekolah	Angka kelulusan SD/MI/SDLB
		Indikator Sasaran :	Rata-rata nilai ujian nasional (UN)SD/MI
		Belum seluruh sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki rata-rata skor Akreditasi A	Persentase R Kelas dalam kondisi baik masih rendah
		Belum seluruh LKP, PKBM dan Lembaga yang memiliki rata-rata skor Akreditasi A	Masih ada peserta Kejar Paket A,B,C yang belum lulus
			Belum seluruhnya tenaga Pendidik Paud/SD/MI/SMP/MTs memiliki kualifikasi S1 sesuai kompetensi
			Belum seluruhnya pelayanan pendidikan berbasis aplikasi
			Masih terdapat siswa SD/SMP sederajat yang dikeluarkan dari sekolah karena pelanggaran disiplin

Dari tabel 3.1 tersebut di atas dianalisis bahwa pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan ada dua permasalahan pokok yaitu :

1. Pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat, dengan permasalahan sebagai berikut :
 - a. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 25 tahun;
 - b. Belum optimalnya Angka melek huruf;
 - c. Belum terpenuhinya harapan lama sekolah;

Adapun akar masalahnya adalah :

- Belum semua tenaga pendidik yang memiliki uji kompetensi dengan nilai minimal baik;
- Kelulusan kejar paket A,B, C dan kursus masih rendah;

- Belum optimalnya tenaga pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi S-1 PG PAUD;
 - Masih banyaknya pelanggaran kedisiplinan/norma sosial oleh peserta didik SD dan SMP sederajat yang berujung dikeluarkannya peserta didik dari sekolah;
 - Rata-rata skor akreditasi sekolah SD dan SMP sederajat B
2. Pengembangan kekayaan sejarah, dan seni budaya daerah, dengan permasalahan yaitu masih rendahnya tingkat pelestarian nilai seni dan budaya.

Sebagai akar masalahnya adalah :

- Belum optimalnya sekolah dan instansi pemerintah yg menerapkan kebijakan budaya lokal;
- Belum optimalnya pelestarian cagar budaya yang ada;
- Masih rendahnya peningkatan kelompok budaya yang aktif di masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pati

1. Visi Bupati–Wakil Bupati Pati terpilih Tahun 2017-2022 adalah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik. Efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada Bidang Pendidikan dan Kebudayaan berpengaruh positif terhadap pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
2. Misi Bupati–Wakil Bupati Pati terpilih Tahun 2017-2022 dalam upaya untuk mewujudkan Visinya adalah :
- a. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
 - d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
 - e. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;

- f. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
- g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
- h. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan;

Terkait dengan misi tersebut di atas, bidang pendidikan dan kebudayaan diproyeksikan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian misi (1) Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal; (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui khususnya peningkatan pelayanan pendidikan. Dengan semakin berkualitasnya pelayanan pendidikan akan mendorong terciptanya kualitas SDM yang handal dan memiliki daya saing. Sedangkan dengan semakin baiknya pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kebudayaan disertai respon dari masyarakat yang positif akan semakin memperkuat akhlak dan budi pekerti masyarakat sesuai dengan kearifan lokal yang ada.

- 3. Permasalahan dalam pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan dapat mengganggu upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah lima tahun ke depan. Ada faktor pendorong dan penghambat bagi Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberikan pelayanan publik.

a. Faktor Pendorong

Faktor pendorong yang dapat membantu terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah adalah :

- 1) Terjalannya koordinasi dan komunikasi antar stakeholder/instansi pemerintah yang terkait baik secara horizontal maupun vertikal sehingga dapat meningkatkan keterpaduan dan sinergitas program di masing-masing instansi maupun unit kerja yang berbeda.
- 2) Dukungan anggaran sebesar minimal 20% dari total APBD memungkinkan pelayanan pendidikan dan kebudayaan berjalan secara optimal.
- 3) Tipologi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang optimal yaitu Tipe A sangat mendukung upaya peningkatan dan perluasan layanan pendidikan dan kebudayaan.

- 4) Tersedianya peluang untuk peningkatan kualitas SDM bidang kependidikan dan kebudayaan melalui fasilitasi peningkatan kualitas SDM aparatur oleh OPD pengampu pengembangan SDM.
 - 5) Adanya implementasi *e-planning* dan *e-budgeting* dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah guna mewujudkan *good governance*.
 - 6) Adanya peningkatan peran orang tua murid dalam pendidikan
- b. Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang menjadi penghambat tercapainya Visi Dan Misi Kepala Daerah terpilih antara lain :

- 1) Kualitas SDM yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk mendukung optimalisasi pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 2) Perencanaan program dan kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan yang masih belum efektif dan efisien.
- 3) Strata pendidikan tenaga pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan PAUD masih relatif rendah.
- 4) Belum sepenuhnya terbangun kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian situs-situs cagar budaya.
- 5) Minat terhadap budaya/kesenian daerah bagi kaum remaja/pemuda semakin menurun.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

1. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 adalah Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong. Terbentuknya insan dan ekosistem pendidikan yang berkarakter dan berlandaskan gotong royong memiliki makna sebagai berikut :
 - 1) Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

- 2) Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air.
- 3) Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible).
- 4) Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat, dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia.
- 5) Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak.

b. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat.
- 2) Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan.
- 3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.
- 4) Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa.
- 5) Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas

c. Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

- 1) Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan;
Sasaran strategis yang ingin dicapai :
 - a) Meningkatnya perilaku positif siswa.
 - b) Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan.
 - c) Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual, dan sosial.
- 2) Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan;
Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan.

3) Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus;

Sasaran strategis yang ingin dicapai :

- a) Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
- b) Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

4) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter;

Sasaran strategis yang ingin dicapai :

- a) Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.
- b) Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah.
- c) Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan.
- d) Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga.

5) Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan;

Sasaran strategis yang ingin dicapai :

- a) Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya.
- b) Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing Indonesia.
- c) Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN.

6) Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan melibatkan Publik;

Sasaran strategis yang ingin dicapai :

- a) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud.
 - b) Dipertahankannya opini laporan keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 - c) Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan.
- d. Faktor Pendorong dan Penghambat bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :
- 1) Faktor Pendorong
 - a) Terjalannya koordinasi dan komunikasi antar stakeholder/instansi pemerintah yang terkait baik secara horizontal maupun vertikal sehingga dapat meningkatkan keterpaduan dan sinergitas program di masing-masing instansi maupun unit kerja yang berbeda.
 - b) Dukungan anggaran sebesar minimal 20% dari total APBD memungkinkan pelayanan pendidikan dan kebudayaan berjalan secara optimal.
 - c) Tipologi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang optimal yaitu Tipe A sangat mendukung upaya peningkatan dan perluasan layanan pendidikan dan kebudayaan.
 - d) Tersedianya peluang untuk peningkatan kualitas SDM bidang kependidikan dan kebudayaan melalui fasilitasi peningkatan kualitas SDM aparatur oleh OPD pengampu pengembangan SDM.
 - e) Adanya implementasi e-planning dan *e-budgeting* dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah guna mewujudkan *good governance*.
 - f) Adanya peningkatan peran orang tua murid dalam pendidikan
 - 2) Faktor Penghambat
 - a) Adanya perubahan peraturan menyangkut kewenangan di bidang pelayanan pendidikan, sehingga mempersulit daerah kabupaten/kota dalam upaya untuk penguatan mutu pendidikan yang ada di daerah tersebut.

- b) Kualitas SDM yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk mendukung optimalisasi pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- c) Perencanaan program dan kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan yang masih belum efektif dan efisien.
- d) Strata pendidikan tenaga pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan PAUD masih relatif rendah.
- e) Belum sepenuhnya terbangun kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian situs-situs cagar budaya.
- f) Minat terhadap budaya/kesenian daerah bagi kaum remaja/pemuda semakin menurun.

2. Telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa

Tengah

- a. Visi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah Pendidikan Jawa Tengah yang Bermutu, Kompetitif, Berkarakter, dan Berkeadilan. Visi ini memiliki makna :
 - 1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal pada semua jenjang pendidikan.
 - 2) Bermutu adalah memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarpras, standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar penilaian dan standar pengelolaan.
 - 3) Kompetitif bermakna pendidikan harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi memadai untuk mampu bersaing di era persaingan global.
 - 4) Berkarakter bermakna sumber daya pendidikan mampu menunjukkan karakter manusia terdidik yang berwawasan kebangsaan tanpa meninggalkan nilai luhur kearifan lokal.
 - 5) Berkeadilan bermakna pendidikan harus menjangkau seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminatif.
- b. Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjangkau.
- 2) Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang berkualitas.
- 3) Meningkatkan Layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
- 4) Mewujudkan Layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang merata berkualitas dan setara.
- 5) Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merata.
- 6) Mewujudkan Layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter.

c. Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang berkualitas dan terjangkau.

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah :

- a) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pengembangan kurikulum dan pembinaan potensi peserta didik PAUD.
- b) Terwujudnya lembaga Pendidikan Non Formal yang setara, sarana prasarana yang memadai dan pengembangan warga belajar yang berkualitas.

- 2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Dasar.

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pembinaan potensi siswa dan penerapan kurikulum yang merata.

- 3) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan merata.

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, berkembangnya kompetensi siswa dan peningkatan kurikulum yang menyeluruh.

- 4) Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan khusus yang bermutu dan setara pada semua jenjang dan jenis ketunaan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, berkembangnya potensi siswa dan terjaminnya lembaga pendidikan yang setara.

- 5) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata sesuai standar yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidik dan tenaga pendidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi.

- 6) Mewujudkan jaminan layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter.

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah :

- a) Meningkatnya dukungan dan kerjasama Perguruan Tinggi dalam pembangunan pendidikan di daerah.
- b) Terwujudnya pelayanan pendidikan berkelanjutan dan pembinaan karakter kebangsaan di bidang pendidikan.
- c) Terwujudnya optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang pendidikan.
- d) Meningkatnya kapasitas dan sarana/prasarana aparatur serta pelayanan administrasi perkantoran.

- d. Faktor Pendorong dan Penghambat bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor Pendorong

- a) Terjalannya koordinasi dan komunikasi antar stakeholder/instansi pemerintah yang terkait baik secara horizontal maupun vertikal sehingga dapat meningkatkan keterpaduan dan sinergitas program di masing-masing instansi maupun unit kerja yang berbeda.
- b) Dukungan anggaran sebesar minimal 20% dari total APBD memungkinkan pelayanan pendidikan dan kebudayaan berjalan secara optimal.
- c) Tipologi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang optimal yaitu Tipe A sangat mendukung upaya peningkatan dan perluasan layanan pendidikan dan kebudayaan.

- d) Tersedianya peluang untuk peningkatan kualitas SDM bidang kependidikan dan kebudayaan melalui fasilitasi peningkatan kualitas SDM aparatur oleh OPD pengampu pengembangan SDM.
 - e) Adanya implementasi *e-planning* dan *e-budgeting* dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah guna mewujudkan *good governance*.
 - f) Adanya peningkatan peran orang tua murid dalam pendidikan
- 2) Faktor Penghambat
- a) Adanya perubahan peraturan menyangkut kewenangan di bidang pelayanan pendidikan, sehingga mempersulit daerah kabupaten/kota dalam upaya untuk penguatan mutu pendidikan yang ada di daerah tersebut.
 - b) Kualitas SDM yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk mendukung optimalisasi pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan.
 - c) Perencanaan program dan kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan yang masih belum efektif dan efisien.
 - d) Strata pendidikan tenaga pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan PAUD masih relatif rendah.
 - e) Belum sepenuhnya terbangun kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian situs-situs cagar budaya.
 - f) Minat terhadap budaya/kesenian daerah bagi kaum remaja/pemuda semakin menurun.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

1. Telaahan terhadap Kebijakan Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang bersinggungan dengan pemanfaatan ruang wilayah (spasial) harus mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030. Hal ini yang harus menjadi pemahaman seluruh pemangku kepentingan karena konsep pembangunan (berbagai sektor) berbasis spasial/kewilayahan menjadi sudah menjadi *mainstream* di dunia.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RTRW Kabupaten Pati telah diatur rencana sistem perwilayahan untuk memudahkan distribusi program pembangunan sesuai dengan karakter kawasan yang terbagi ke dalam 6 (enam) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) sebagai berikut :

- a. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Pati meliputi : Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, dan Kecamatan Gabus;
- b. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) II dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Trangkil meliputi : Kecamatan Trangkil, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan Margoyoso;
- c. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) III dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Tayu meliputi : Kecamatan Tayu, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gunungwungkal , dan Kecamatan Dukuhseti;
- d. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Juwana meliputi : Kecamatan Juwana, Kecamatan Wedarijaksa, dan Kecamatan Batangan;
- e. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) V dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Jakenan meliputi : Kecamatan Jakenan, Kecamatan Jaken, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Pucakwangi; dan
- f. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VI dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Kayen meliputi : Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Tambakromo.

Perencanaan pembangunan dalam rangka pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan perlu memahami tentang aspek pengembangan tata ruang yang meliputi pengembangan struktur ruang dan pengembangan pola ruang sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah tentang tata ruang. Struktur ruang dalam penerapan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, erat kaitanya dengan konektivitas antar wilayah sebagai prasyarat untuk kemudahan pelayanan dan pengembangan pendidikan dan

kebudayaan. Sedangkan pola ruang berhubungan dengan peruntukkan ruang yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat melalui pesan-pesan dalam dunia pendidikan dan kebudayaan dimana hal ini sangat membantu pemerintah dalam penerapan kebijakan tata ruang wilayah daerah menjadi semakin efektif dan efisien.

Sehubungan dengan implementasi peraturan daerah terkait RTRW ada beberapa faktor penghambat dalam penerapan meskipun tingkat pelanggaran terhadap aspek tata ruang wilayah dalam pelayanan pendidikan hampir tidak pernah ada. Faktor penghambatnya adalah terkait pembangunan gedung sekolah maupun sarana pendidikan dan kebudayaan yang lain karena semakin mendesaknya kebutuhan akan pembangunan sarana prasarana fisik. Hal ini biasanya terjadi karena lemahnya koordinasi dengan pihak terkait khususnya dengan perangkat daerah pengampu bidang tata ruang. Sedangkan faktor pendorongnya adalah pendidikan dan kebudayaan dapat menjadi media transfer pemahaman/pengetahuan perihal seluk beluk peraturan tata ruang wilayah bagi segenap aktivitas manusia agar tercipta keteraturan dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan di daerah.

3.5 Isu-Isu Strategis Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan mengacu pada berbagai uraian tentang permasalahan yang ada dalam aspek pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan serta uraian terhadap faktor-faktor yang mendorong maupun yang menghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati untuk menjaga keterpaduan dan keserasian dengan pemerintah pusat lewat kementerian terkait dan dinas terkait Provinsi Jawa Tengah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (Tahun 2017-2022), maka diperoleh kesimpulan terkait isu-isu strategis yang muncul dimana akan dijadikan sebagai landasan dalam penetapan strategi dan arah kebijakan daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan/organisasi pendidikan;

2. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk menjamin keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan;
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja OPD bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Membangun kesadaran dan minat masyarakat akan kelestarian budaya/kesenian serta situs/benda cagar budaya lokal.